



---

**Perubahan Kebijakan Sektor Ketahanan Pangan  
Organisasi Internasional D-8**

Daffa Muhammad<sup>1\*</sup>, Hasbi Sidik, S.IP., M.A.<sup>2</sup>, Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Indonesia

\*Corresponding author: International Relations Study Program, University of Lampung.

Email: daffamu.28@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Sejak tahun 2009 bidang pertanian dan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus dalam agenda D-8 (Organisasi Kerjasama Delapan). Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan Organisasi D-8 bersifat progresif, dan terus mengalami perubahan kebijakan maupun fokus program. Oleh karena itu, perubahan kebijakan dan kepentingan atas perubahan kebijakannya tersebut menjadi hal menarik untuk diteliti. Pada, dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara lebih lebih terperinci terkait kebijakan ketahanan pangan organisasi D-8 beserta kepentingannya merubah kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan staff biro Kerjasama Luar Negeri terkait ketahanan pangan, serta data sekunder berupa dokumen resmi berupa laporan rapat, sidang, deklarasi dan dokumen informatif lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Teknik Huberman dan Miles, dengan menggunakan 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori perubahan kebijakan, dan konsep organisasi internasional, serta ketahanan pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan terjadi dalam rangka mengantisipasi perubahan arah pertanian secara global terutama kebijakan yang disepakati dalam lembaga pangan dunia FAO. Disisi lain perubahan terjadi sebagai salah satu adaptasi adanya pertumbuhan teknologi dibidang pertanian serta pengaruh perubahan iklim global, dan melahirkan kesepakatan *Climate Smart Agriculture* (CSA) atau Pertanian Cerdas Iklim.

**Kata Kunci :** *Climate Smart Agriculture, D-8, Perubahan Kebijakan*

### **ABSTRACT**

*Since 2009 agriculture and food security have become one of the main focuses of the D-8 (Organization of Eight Cooperation) agenda. The D-8 Agriculture and Food Security Policy is experiencing changes in policy and program focus. Therefore, policy changes and its interest in changing the policy are interesting to be furthered studied. Basically, this study aims to describe the D-8's food security policies, including its interest on changing the policy. This study uses a descriptive qualitative approach, using primary data in the form of interviews with staff of the Foreign Cooperation Bureau related to food security, as well as secondary data, such as meeting reports, sessions, declarations and other relevant and informative documents. This study uses the Huberman and Miles data analysis technique which uses 4 stages of data analyzing, which are data collection, data condensation, data presentation, and drawing the conclusions. The study uses policy changes theory, as well as international organizations and food security concept. The results of this study indicate that policy changes occur in order to anticipate the changes in the direction of agriculture globally, especially policies agreed upon in the world food agency FAO. On the other hand, changes occur as one of the adaptations to the growth of technology in agriculture and the influence of global climate change, developing the Climate Smart Agriculture (CSA) program.*

**Key words:** *Climate Smart Agriculture, D-8, policy changes*

### **PENDAHULUAN**

Organisasi D-8 (*Developing-8*) atau organisasi pembangunan delapan, merupakan organisasi negara-negara berkembang yang terdiri dari negara Turki, Pakistan, Malaysia, Iran, Indonesia, Mesir, dan Bangladesh. Tujuan Organisasi D-8 adalah untuk meningkatkan posisi negara-negara anggotanya dalam perekonomian global, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup negara anggotanya. D-8 menjadi forum global yang membahas berbagai isu, seperti perdagangan, industri, pembangunan pedesaan, pertanian dan ketahanan pangan, sains dan teknologi, serta pengurangan kemiskinan.

Perhatian D-8 terhadap perkembangan pertanian di negara anggota, diawali dengan adanya Pertemuan Pertama Tingkat Menteri Pertanian D-8 pada 25-27 Februari 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada pertemuan ini dibahas secara mendalam pentingnya D-8 mendukung sektor pertanian. Hal ini karena pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu menyumbang PDRB sebesar 20-25% di masing-masing negara anggota (Kuala Lumpur Initiative, 2009). Pertemuan pertama membahas adanya kekhawatiran kepunahan sumberdaya genetik tanaman akibat perubahan iklim, degradasi lahan, urbanisasi dan deforestasi. Kehilangan sumberdaya genetik tanaman akan menjadi ancaman terhadap hilangnya sifat-sifat

penting tanaman seperti ketahanan terhadap faktor abiotik (kekeringan, banjir, degradasi lahan) dan faktor biotik seperti ketahanan terhadap hama dan penyakit. Perhatian D-8 pada bidang pertanian, khususnya ketahanan pangan, semakin intensif, pada pertemuan selanjutnya di tahun 2011 di Teheran, Iran. Konferensi Teheran melahirkan berbagai kebijakan penting dalam upaya kolektif mendukung ketahanan dengan terbentuknya program D-8 untuk ketahanan pangan atau *D8 Programme Food Security (D8PFS)*. Program tersebut berfokus pada peningkatan program ketahanan pangan nasional dan langkah-langkah negara-negara anggota D-8 untuk :

- a) meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian;
- b) memperluas perdagangan komoditas pertanian di antara anggota D-8;
- c) meningkatkan pertukaran pengalaman dan pandangan mengenai kebijakan ketahanan pangan melalui penguatan kemampuan lembaga dan langkah-langkah lainnya; dan
- d) adanya pelibatan forum sektor swasta untuk mendukung mengidentifikasi atau memulai proyek kegiatan yang konkret.

*Food and Agriculture Organization (FAO)* mengidentifikasi empat dimensi utama ketahanan pangan berupa:

- a) Ketersediaan Fisik Makanan: Terkait dengan produksi, persediaan, dan perdagangan makanan.
- b) Akses ekonomi dan fisik ke makanan: fokus pada pendapatan, pengeluaran, pasar, dan harga untuk memastikan akses yang memadai terhadap makanan.
- c) Pemanfaatan Makanan: Melibatkan cara tubuh memanfaatkan nutrisi dalam makanan melalui praktik perawatan, persiapan, keragaman diet, dan distribusi makanan di dalam rumah tangga.
- d) Stabilitas dari Tiga Dimensi Lain dari Waktu ke Waktu: Penting untuk menjaga stabilitas akses makanan secara periodik untuk mencegah penurunan kondisi gizi, terutama dalam menghadapi faktor-faktor seperti kondisi cuaca buruk, ketidakstabilan politik, dan masalah ekonomi.

Pertemuan D-8 tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual dengan tema “Pengembangan industri pertanian berkelanjutan dan integrasi petani kecil dalam rantai nilai global” semakin memperkuat peran sektor pertanian dalam ketahanan pangan di organisasi D-8 (*Sixth D-8 Ministerial Meeting on Agriculture and Food Security, 2020*). Tidak hanya itu, Organisasi D-8 juga merilis *roadmap* D-8 periode tahun 2020-2030, yang memuat sejumlah target yang selaras dengan *Sustainable Development Goals (SGD)* (Kemenlu, 2021).

Pandemi covid-19 telah mengakibatkan banyak perubahan ketahanan pangan dunia yang mengakibatkan mal nutrisi dan kekurangan pangan di banyak negara. Perubahan iklim yang terjadi sangat cepat akibat kerusakan bumi telah memacu penurunan pasokan pangan yang berasal dari sektor pertanian. Disisi lain, teknologi telah berkembang dengan pesat, peluang perbaikan teknologi berbasis adaptasi dan mitigasi iklim semakin berkembang. Oleh karena itu tema Pertanian Cerdas Iklim sangat relevan dengan ketahanan pangan dimana saat ini sektor pertanian harus mengadopsi teknologi baru dan sistem transformasi pangan seperti *Climate Smart*

*Agriculture*, untuk menjadikan sistem pertanian pangan lebih tangguh, efisien, berkelanjutan, dan inklusif (Annex III - Statement by the Secretary General of D-8). Oleh karena itu, berdasarkan hal ini penulis akan melakukan analisis bagaimana terjadinya proses perubahan kebijakan yang terjadi pada Pertemuan Menteri Pertanian D-8 tentang Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Februari 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia hingga pertemuan yang diadakan di Bangladesh pada tahun 2022.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan subjek serta mengungkap semua fenomena yang terlihat dan makna di baliknya (Harahap, 2020). Metode ini berlandaskan pada pemikiran induktif dan melibatkan pengamatan objektif serta partisipatif terhadap fenomena sosial (Harahap, 2020). Penelitian ini akan memberikan penjelasan empiris terkait fokus yang diteliti, yaitu perubahan kebijakan sektor ketahanan pangan dalam organisasi internasional D-8.

Sumber data yang diambil terdiri atas 2 jenis, pertama adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan responden relevan dari Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian. Kedua adalah data sekunder, data ini akan memperkuat hasil wawancara, data diambil dari referensi pendukung seperti jurnal, buku, laporan tahunan, dokumen resmi kegiatan D-8 dan sumber bacaan lainnya. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, baik berupa tabel dan gambar. Metode ini akan memberikan gambaran jelas bagi penulis untuk merumuskan terjadinya perubahan kebijakan organisasi internasional D-8 pada sektor ketahanan pangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsensus Ketahanan Pangan D-8**

Konsensus terkait isu ketahanan pangan dan pertanian di Organisasi D-8 telah terjadi sejak berdirinya organisasi tersebut pada tahun 1997. Isu ketahanan pangan semakin menjadi fokus organisasi sebagaimana banyak negara anggotanya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama negara mereka. Tidak hanya itu, secara khusus, kebijakan ketahanan pangan dan pertanian D-8 mulai dikembangkan secara lebih serius pada awal tahun 2000an seiring dengan semakin mendesaknya isu-isu global terkait ketahanan pangan. Tidak hanya itu, kedelapan negara anggota D-8 juga menyumbangkan luas lahan pertanian cukup besar di dunia. Adapun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2020, rasio luas lahan pertanian anggota D-8 terhadap dunia mencapai hingga 11,68 persen, seperti yang dapat terlihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Luas Lahan Pertanian Negara Anggota D-8 (dalam ribuan)**

Negara	2000	2010	2015	2020
Dunia	1492425,3	1521319,6	1550307,9	1561667,7
Malaysia	6653,7	7104,3	8285	8286
Turki	26379	24395	23934	23145
Indonesia	36000	44600	46300	51300
Mesir	3291	3671	3789,9	3971
Pakistan	31698	30242	31202	31723
Bangladesh	8800	8641	8824,2	9301
Iran	16284	17062,4	19477	17536
Nigeria	41000	39700	41500	41500
Persentase Terhadap Luas Lahan Dunia	11,40	11,53	11,82	11,96

Sumber: *Statistical Yearbook FAO 2022*

### B. Ketahanan Pangan Dalam Prespektif Fokus Program D-8

Sebagai organisasi internasional negara-negara berkembang, D-8 berfokus pada isu-isu mendasar yang mempengaruhi stabilitas dan pembangunan ekonomi, termasuk ketahanan pangan. Mengingat mayoritas negara anggota D-8 memiliki sektor pertanian yang cukup signifikan, dimana ketahanan pangan sebagai landasan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Salah satu contoh nyata komitmen D-8 terhadap ketahanan pangan adalah upayanya untuk meningkatkan kerja sama teknis dan ilmiah antar negara anggota dalam pengembangan sektor pertanian. Melalui program kerja sama ini, negara-negara anggota dapat bertukar pengalaman, keahlian dan teknologi yang terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Indonesia, sebagai anggota aktif D-8, juga berperan penting dalam mendorong ketahanan pangan di kawasan.

Salah satu yang mendorong fokus utama kegiatan D-8 adalah program ketahanan pangan, karena hampir semua negara anggota, kecuali Turki, memiliki prevalensi penduduk kurang gizi yang tinggi. Hal ini juga mengakibatkan tingkat kerawanan pangan ataupun juga tingkat ketidakpastian pangan di masing-masing negara anggota. Pada Tabel 2 dan tabel 3 ditunjukkan bahwa masih tingginya prevalensi ketidakamanan pangan yang parah yang ditunjukkan dari estimasi persentase orang dalam populasi yang tinggal di rumah tangga yang tergolong sangat tidak aman pangan.

**Tabel 2. Prevalensi Penduduk Kurang Gizi (%)**

Negara	2000-2002	2004-2006	2009-2011	2014-2016	2017-2019	2019-2020
Dunia	13.1	12.2	8.9	7.9	7.8	9.0
Malaysia	2.5	3.2	3.4	3.8	2.7	2.6
Turki	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5

Indonesia	19.2	19.2	13.0	14.5	5.9	6.2
Mesir	5.2	6.4	4.5	4.4	4.9	5.0
Pakistan	21.1	17.6	15.4	12.8	12.3	14.1
Bangladesh	15.9	14.2	15.2	14.0	11.5	11.4
Iran	4.8	5.2	6.1	4.7	5.2	4.9
Nigeria	8.9	7.1	8.2	9.2	10.4	12.0

Sumber: *Statistical Yearbook FAO 2022*

Tabel 2 dan Tabel 3 juga menunjukkan tolak ukur untuk melihat tingkat kecukupan gizi masyarakat yang masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab ketahanan pangan menjadi salah satu agenda khusus dalam D-8.

**Tabel 3. Tingkat Ketidakpastian/Kerawanan Pangan (Persen)**

Negara	2000-2002	2004-2006	2009-2011	2014-2016	2017-2019	2019-2020
Dunia	7.7	8.9	9.7	10.7	24.8	28.1
Malaysia	7.8	6.7	6.6	6.3	15.1	15.4
Turki	-	-	-	-	-	-
Indonesia	0.7	0.8	0.7	0.7	7.0	6.0
Mesir	8.4	7.4	6.7	7.1	31.2	27.3
Pakistan	0.9	1.6	4.8	8.7	14.2	32.6
Bangladesh	13.3	10.6	10.5	10.7	31.5	31.7
Iran	9.5	8.4	8.7	7.7	40.6	42.4
Nigeria	11.0	15.1	17.3	19.1	47.1	58.2

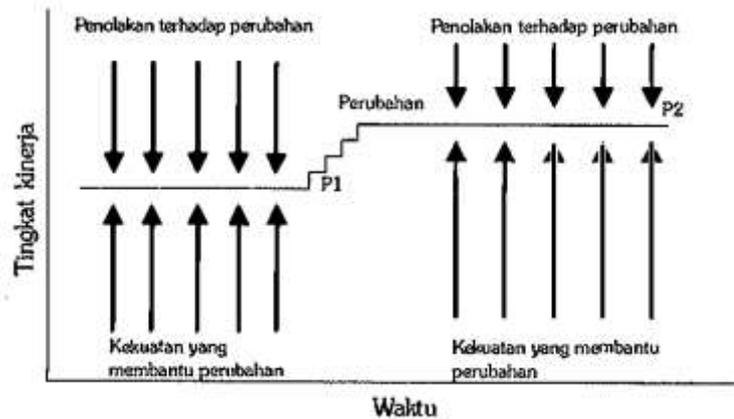
Sumber: *Statistical Yearbook FAO 2022*

### C. Analisis Perubahan Kebijakan Ketahanan Pangan D-8

Sejak berdirinya Organisasi D-8, kebijakan ketahanan pangan mengalami beberapa perubahan kebijakan. Perubahan adalah hal yang mutlak terjadi, dikarenakan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Perubahan kebijakan dipengaruhi oleh dinamika global. Salah satu contohnya adalah yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, serta penyesuaian terhadap prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh FAO. Faktor eksternal perubahan kebijakan sering kali dipicu oleh tekanan dari luar organisasi, baik itu dari negara-negara maupun aktor kolektif lainnya seperti LSM.

Disisi lain perubahan kebijakan juga bisa disebabkan faktor internal dimana tekanan juga dapat timbul dari dalam organisasi itu sendiri. Howlett dan Ramesh melihat perubahan kebijakan sebagai hasil dari proses yang kompleks dan bervariasi yang melibatkan interaksi antara berbagai elemen. Secara keseluruhan, perubahan kebijakan mencakup modifikasi dalam tujuan, alat, atau implementasi kebijakan yang ada. Ini bisa dipicu oleh gangguan dari luar seperti krisis atau perubahan politik, atau karena pembelajaran dari pengalaman sebelumnya (Howlett & Ramesh, 2002).

Perubahan kebijakan organisasi berdasarkan teori Kurt Lewin dalam model perubahan yang disebut *Lewin's Force Field Theory of Change*, dimana perubahan organisasi sangat dipengaruhi oleh kekuatan dorongan pihak yang ingin berubah dan dorongan dari pihak yang menolak perubahan. Perubahan akan terjadi jika dorongan kekuatan pihak ingin berubah lebih besar dari pada pihak yang menolak perubahan. Secara umum model perubahan tersebut dapat digambarkan melalui gambar berikut:



**Gambar 1. *Lewin's Force Field Theory of Change***  
**Sumber: Winardi (2006)**

Berdasarkan teori Lewin's, maka setiap perubahan yang terjadi di dalam kebijakan Ketahanan Pangan D-8 didorong oleh adanya kekuatan besar, yang bisa berasal dari internal maupun eksternal D-8. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh internal dan eksternal, yang memperlihatkan tidak sepenuhnya kebijakan ketahanan pangan D-8 didasarkan pada kepentingan para anggota D-8 saja. Berbagai faktor eksternal juga turut mempengaruhi dinamika kebijakan tersebut. Beberapa diantaranya adalah tantangan global, tekanan internasional, serta kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan komitmen global terkait ketahanan pangan dan pertanian. Tabel 4 memperlihatkan kebijakan ketahanan pangan D-8 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

**Tabel 4. Matriks Faktor Internal dan Eksternal dalam Ketahanan Pangan D-8**

<b>Faktor Kunci</b>	<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
Kepentingan Kebijakan	Kepentingan Nasional merupakan faktor kunci dalam implementasi ketahanan pangan dan penyesuaian dengan berbagai program D-8	Kepentingan global yang diinisiasi oleh Lembaga Internasional besar seperti PBB, mengharuskan setiap negara anggota untuk mentaati setiap kebijakan, termasuk kebijakan ketahanan pangan. Dalam hal ini semua negara D-8 juga merupakan anggota PBB

Sumberdaya alam	Setiap negara anggota D-8 memiliki daya adaptasi terhadap berbagai kebijakan ketahanan pangan D-8, sumberdaya alam setiap negara D-8 memiliki kultur dan kondisi berbeda. Indonesia dengan kekuatan alamnya serta keberagaman habitat dengan julukan “the second megabiodeversity in the world” memiliki potensi dalam pengembangan ketahanan pangan lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya.	berbagai faktor eksternal yang turut mempengaruhi dinamika ketahanan pangan salahsatunya adalah krisis pangan global, yang akan membidik negara dengan sumberdaya alam tinggi menjadi salah satu fokus sebagai lumbung pangan dunia. Salah satunya Indonesia yang ditetapkan oleh PBB menjadi lumbung pangan dunia.
Tantangan global, tekanan internasional	Indonesia dan negara D-8 memiliki populasi manusia yang besar dalam pemenuhan ketahanan pangan. Disisi lain bahwa sumberdaya manusia menjadi salah satu alat tenaga kerja yang efektif. Disamping sumberdaya alam yang sangat luar biasa potensial dalam pengembangan ketahanan Pangan	Isu-isu kebijakan dengan China menjadi salah satu contoh bahwa beberapa negara D-8 salahsatunya Indonesia terpengaruh oleh tekanan global dan Internasional dari China. Ketergantungan akaj hutang menjadikan sumberdaya alam dan manusia dapat diatur oleh negara China dengan berbagai skema kebijakan dibidang pertanian, seperti pembelian benih/bibit, tenaga kerja terampil, pupuk, alat dan mesin pertanian yang berasal dari negara tersebut.

Sumber : hasil olahan penulis

#### **D. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan D-8**

Implementasi merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan kebijakan, dan suatu proses di mana segala sesuatu terjadi untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi merupakan suatu tahap yang dinamis. Implementasi kebijakan yang dilakukan secara terarah dan efisien akan dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik, semakin kompleks masalah kebijakan dan semakin dalam analisis yang digunakan, maka diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan implementasi kebijakan tersebut (Shafa dkk., 2022).

**Tabel 5. Implementasi Agenda D-8**

No.	Bentuk Kebijakan	Tahun
1.	Produksi, pasokan, dan distribusi pupuk yang berkualitas, produksi dan pasokan pakan ternak berkualitas, pembentukan bank benih untuk memasok benih berkualitas tinggi, pembentukan sistem layanan informasi pasar untuk pakan ternak, bank benih dan pupuk, Pentingnya standar dan perdagangan.	2009
2.	Pengenalan Program D-8 untuk Keamanan Pangan (D8-PFS), Pengenalan Jaringan Manajemen Informasi dan Pengetahuan D-8, Produksi Ternak ( <i>Halal Food Industry</i> ).	2013
3.	Kebijakan pengadopsian D-8 juga berfokus pada pengembangan agroindustri dan pengintegrasian petani kecil.	2020
4.	Kebijakan CSA ( <i>Climate Smart Agriculture</i> ) atau Pertanian Cerdas Iklim	2022

Sumber : Diolah oleh peneliti melalui beberapa sumber.

Meskipun terdapat kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan D-8, beberapa tantangan masih menghambat implementasinya secara optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah disparitas kemampuan teknis dan finansial antar negara anggota. Berdasarkan hasil wawancara dan data Global Food Security Index 2022, disparitas disebabkan faktor kemampuan negara dalam penanganan ketahanan pangan, politik, sumberdaya alam, perubahan iklim dan faktor lainnya. Adapun disparitas masing-masing negara anggota D-8 tergambar dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 6. Disparitas Ketahanan Pangan Negara D-8**

Negara	Score Ketahanan Pangan	Ketersediaan	Kendala	Potensi Pengembangan Ketahanan Pangan
Malaysia	69.9	Cukup	Climate change	Darat, laut, teknologi berbasis CSA, perbenihan dan perbibitan, pupuk
Turki	65.3	Cukup	Climate change	Darat, laut, teknologi berbasis CSA, perbenihan dan perbibitan, pupuk
Indonesia	60.2	Cukup	Climate change, Interest Policy	Darat, laut, sumberdaya genetik, perbenihan dan perbibitan.
Mesir	56.0	Agak Kurang	Climate change, Interest Policy, SDA	Darat, teknologi pemupukan

Pakistan	52.2	Agak Kurang	Climate change, Konflik Politik, SDA	Darat dan sumberdaya genetik
Bangladesh	54.0	Agak Kurang	Climate change, Interest Policy, SDA	Darat, laut, pemupukan dan pembibitan
Iran	42.0	Kurang	Climate change, Interest Policy, Konflik Palestine dan Irak	Darat, teknologi berbasis CSA, perdagangan
Nigeria	42.0	Kurang	Climate change, Interest Policy, SDA, SDM, kekacauan politik	Sumberdaya alam

Sumber: Hasil Olahan Penulis dari berbagai sumber (Global Food Security Index, 2022); (Economist-Impact-GFSI-Global Report 2022).

Negara-negara seperti Nigeria dan Bangladesh menghadapi kesulitan dalam menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai, sementara negara-negara seperti Malaysia dan Turki memiliki kemampuan lebih baik dalam hal teknologi dan investasi. Selain itu, kendala politik dan birokrasi sering kali memperlambat pelaksanaan kebijakan ini. Di beberapa negara anggota, ketidakstabilan politik dan konflik internal berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan ketahanan pangan.

### **E. Penilaian Pertimbangan dan Evaluasi Kebijakan D-8**

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan serta dampaknya, dan evaluasi ini dapat dilakukan sepanjang proses pembuatan kebijakan, bukan hanya pada akhir (Fischer dkk., 2007). Suatu pemberlakuan aturan atau kebijakan perlu diadakan evaluasi guna dilihat dan ditinjau aspek apa saja yang kiranya diperbaiki dan dipertahankan untuk waktu yang akan datang (Warman dkk., 2023). Tujuan dari evaluasi kebijakan bukan untuk membuktikan dengan nilai namun untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, ataupun hasil kinerja suatu kebijakan atau program (Hajaroh, M, 2019). Apabila meninjau dari beberapa *summit* yang diadakan oleh D-8 mengenai kebijakan pangan, maka evaluasi kebijakan ketahanan pangan di negara anggota D-8 merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuan

ketahanan pangan nasional dan regional.

Analisis SWOT pada revisi dan pembaruan kebijakan dapat membantu strategi kompetitif merupakan salah satu cara untuk mengetahui daya saingnya disetiap kekuatan (Nisak, 2013). Secara umum analisis SWOT ini digunakan untuk menganalisis hasil wawancara serta dokumen hasil Konfrensi Ketahanan Pangan D-8 yang ada di Kementerian Pertanian.

**Tabel 7. Analisis SWOT terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan D-8**

<b>Internal Faktor</b>	
<p><b>Strength/Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki visi dan misi yang sama dalam upaya pemenuhan ketahanan pangan</li> <li>2. Kepentingan bersama dengan kondisi kultur keagamaan</li> <li>3. Negara agraris</li> <li>4. Sumberdaya alam yang luas dengan eksosistem yang unik serta diversitas yang tinggi</li> </ol>	<p><b>Weaknes/Kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi ketahanan pangan berbiaya tinggi bagi penyelenggaraan bersama</li> <li>2. Penelitian dan tukar menukar informasi masih sedikit</li> <li>3. Regulasi tiap negara berbeda-beda dalam ketahanan pangan trgantung kondisi internal dari masing-masing negara terutama terkait kebijakan politik.</li> </ol>
<b>Eksternal Faktor</b>	
<p><b>Opportunity/Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketahanan pangan merupakan isu global yang diusung oleh PBB</li> <li>2. Pendanaan global dengan skema peminjaman ataupun skema hibah yang cukup tinggi di bidang pemenuhan ketahanan pangan dan pertanian</li> <li>3. Teknologi dibidang ketahanan pangan dan pertanian sudah berkembang pesat</li> </ol>	<p><b>Threat/Ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya intervensi dari Organisasi Internasional yang lebih besar</li> <li>2. Perubahan kebijakan ketahanan pangan dan pertanian selalu terjadi di setiap konfrensi.</li> <li>3. Tidak konsisten nya negara anggota dalam implementasi hasil rumusan kebijakan D-8</li> </ol>

Sumber: Diolah oleh peneliti

#### **F. Perspektif Keberhasilan Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 pada Negara-Negara Anggota**

Program Ketahanan Pangan D-8 mengalami perubahan dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal di setiap negara anggotanya. Implementasi program-program Ketahanan Pangan dan keberhasilan pencapaiannya juga mengalami perbedaan antar negara. Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana perubahan program Ketahanan Pangan D-8 pada masing-masing negara anggotanya. Sebelumnya kan dibahas bagaimana perubahan program ketahanan pangan D-8 terjadi dan apa penyebabnya, yang akan dibahas dalam Tabel 8 dibawah ini .

**Tabel 8. Bentuk Kebijakan dan Faktor Penyebab Perubahan Kebijakan Ketahanan Pangan D-8**

No.	Bentuk Kebijakan	Faktor Penyebab	Tahun
1.	Produksi, pasokan, dan distribusi pupuk yang berkualitas, produksi dan pasokan pakan ternak berkualitas, pembentukan bank benih untuk memasok benih berkualitas tinggi, pembentukan sistem layanan informasi pasar untuk pakan ternak, bank benih dan pupuk, Pentingnya standar dan perdagangan.	Terjadinya degradasi pada sumber daya genetik tanaman, lahan, pakan alami dan biota laut.	2009, Malaysia Initiative
2.	Pengenalan Program D-8 untuk Keamanan Pangan (D8-PFS), Pengenalan Jaringan Manajemen Informasi dan Pengetahuan D-8, Produksi Ternak ( <i>Halal Food Industry</i> ).	Negara D-8 mayoritas muslim, sehingga keamanan pangan dan halal menjadi fokus utama.	2013 Pakistan Initiative
3.	Kebijakan pengadopsian D-8 juga berfokus pada pengembangan agroindustri dan pengintegrasian petani kecil.	Permasalahan industri dibidang pertanian sangat sedikit dan dikuasai oleh pihak tertentu, dan kebanyakan petani merupakan petani gurem. Penyebab lainnya adalah Terjadi pandemi Covid-19.	2020 On-line
4.	Kebijakan CSA ( <i>Climate Smart Agriculture</i> ) atau Pertanian Cerdas Iklim	Fenomena perubahan iklim dunia serta terjadinya Pandemi Covid-19	2022 On-line

Implementasi terhadap perubahan program ketahanan pangan di negara-negara anggota tentu sangat beragam. Berikut dipaparkan sekilas terkait implementasi program Ketahanan Pangan D-8 disetiap negara anggotanya.

### Turki

Sebagai salah satu negara yang paling maju di organisasi D-8, maka turki memiliki karakteristik yang lebih adaptif terhadap semua perubahan kebijakan Ketahanan Pangan D-8, seperti yang dapat terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 9. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Turki**

Karakteristik	2000-2002	2004-2006	2009-2011	2014-2016	2017-2019	2019-2020
Prevalensi Penduduk Kurang Gizi (%)	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Tingkat Ketidakpastian/Kerawanan Pangan (%)	-	-	-	-	-	-
Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8	Seed Bank	Pupuk	Keamanan Pangan	Halal Pangan	Agro industri	CSA
	SB	SB	C	B	B	SB

Sumber: *Statistical Yearbook FAO 2022*

Ket : SB = Sangat Baik; B= Baik; C= Cukup; AK= Agak Kurang; K= kurang

Berdasarkan data dari FAO dari tahun 2000-2020 ketahanan pangan di Turki sangat terjaga, dengan prevalensi penduduk terancam kekurangan Gizi kurang dari 2,5% setiap tahunnya. Hal ini berartikan bahwa sejak pemberlakuan program ketahanan D-8, Turki sudah berhasil dengan implementasinya. Hal ini didukung juga dengan adanya bank benih yang memadai, ketersediaan pupuk serta pengembangan CSA yang lebih modern dibandingkan dengan negara D-8 lainnya.

### Malaysia

Berdasarkan Tabel dibawah ini, maka Gambaran secara umum Malaysia cukup berhasil dalam implementasi program ketahanan D-8. Kekuatan Malaysia terutama pada kekuatan pelaksanaan *seed bank*, ketersediaan pupuk serta pelaksanaan CSA yang modern. Ini terbukti bahwa walaupun pada periode 2019-2020 dimana terjadi pandemi covid-19, tingkat prevalensi penduduk kurang gizi menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,6% pertahun.

**Tabel 10. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Malaysia**

Karakteristik/ tahun	2000- 2002	2004- 2006	2009-2011	2014- 2016	2017- 2019	2019- 2020
Prevalensi Penduduk Kurang Gizi (%)	2.5	3.2	3.4	3.8	2.7	2.6
Tingkat Ketidakpastian /Kerawanan Pangan (%)	7.8	6.7	6.6	6.3	15.1	15.4
Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8	Seed Bank	Pupuk	Keamanan Pangan	Halal Pangan	Agro industri	CSA
	SB	SB	C	B	B	SB

Sumber: *Statistical Yearbook FAO 2022*

Ket : SB = Sangat Baik; B= Baik; C= Cukup; AK= Agak Kurang; K= kurang

## Indonesia

Pada awal mula pembentukan sektor ketahanan D-8, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kebijakan dalam memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melestarikan sumber daya alam. Akan tetapi, indeks kerawanan pangan Indonesia mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2017-2021, yang awalnya berkisar pada 0,7% pada tahun 2014-2016 naik hingga 6,5%. Hal ini tentu menjadi masalah dikarenakan sejak awal tahun 2000-an indeks kerawanan pangan Indonesia relatif sangat rendah hanya di 0,7%-0,8%. Peningkatan ini didasari oleh semakin berkurangnya lahan pertanian serta dampak dari perubahan iklim dan covid-19. Oleh karena itu pada tahun 2021, D-8 mencetuskan inisiatif Dhaka yang membahas *Climate Smart Agriculture (CSA)*. CSA sendiri sudah banyak diterapkan di Indonesia seperti *Conservation Agriculture, Balanced Fertilization, Water Management* dan bidang lainnya.

Indonesia sendiri menyadari dampak dari perubahan iklim seperti kekeringan, curah hujan rendah di daerah rawan bencana iklim seperti NTB, NTT, serta Sulawesi Tengah. Dampak positif penerapan CSA di Indonesia terlihat dari *Conservation Agriculture* yang mengurangi biaya tenaga kerja sebesar 33%, meskipun total biaya produksi meningkat 3% dibandingkan dengan metode konvensional. Hasil rata-rata jagung juga meningkat 63 persen. Kandungan karbon tanah meningkat 29 persen. Sekitar 16.333 petani Indonesia telah mencoba dan memvalidasi dampak dari CSA ini.

**Tabel 11. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Indonesia**

Karakteristik/tahun	2000- 2002	2004- 2006	2009- 2011	2014- 2016	2017-2019	2019- 2020
Prevalensi Penduduk Kurang Gizi (%)	19.2	19.2	13.0	14.5	5.9	6.2
Tingkat Ketidakpastian/Kerawanan Pangan (%)	0.7	0.8	0.7	0.7	7.0	6.0
Implementasi	Seed	Pupuk	Keaman	Halal	Agroindus	CSA

Program Ketahanan Pangan D-8	Bank		an	Pangan	tri	
	C	C	C	B	C	B

Sumber: *Statistical Yearbook FAO 2022*

Ket : SB = Sangat Baik; B= Baik; C= Cukup; AK= Agak Kurang; K= kurang

### Mesir

Mesir merupakan negara di Timur Tengah dengan karakteristik islam modern dengan pengukuhan makanan halal yang sangat bagus. Namun demikian tidak semua program Ketahanan Pangan D-8 dapat diimplementasikan dengan baik karena berbagai faktor diantaranya terjadinya konflik Palestina-Israel dan pandemi covid-19 mengakibatkan ketersediaan pangan terganggu. Hal ini menyebabkan pada periode 2017-2020 terjadi peningkatan prevalensi penduduk kurang gizi dan kerawanan pangan masing-masing sebesar 5 persen dan 27,3 persen. Disamping itu implementasi *seed bank*, keamanan pangan serta agroindustri masih kurang.

**Tabel 12. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Mesir**

Karakteristik/tahun	2000-2002	2004-2006	2009-2011	2014-2016	2017-2019	2019-2020
Prevalensi Penduduk Kurang Gizi (%)	5.2	6.4	4.5	4.4	4.9	5.0
Tingkat Ketidakpastian/Kerawanan Pangan (%)	8.4	7.4	6.7	7.1	31.2	27.3
Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8	Seed Bank	Pupuk	Keamanan Pangan	Halal Pangan	Agroindustri	CSA
	C	SB	AK	SB	K	B

Sumber: *Statistical Yearbook FAO 2022*

Ket : SB = Sangat Baik; B= Baik; C= Cukup; AK= Agak Kurang; K= kurang

### Pakistan

Pakistan negara dengan sumberdaya alam yang besar, keragaman budaya tinggi dengan adanya berbagai etnik budaya. Ini berpengaruh terhadap konflik internal dan juga pengaruh iklim yang mengakibatkan pasokan pangan bisa terganggu. Disamping itu Pakistan belum secara konsisten menerapkan program Ketahanan Pangan D-8 secara massif, dengan berbagai kendala yang dihadapi dari mulai program *seed bank*, pupuk dan CSA. Data FAO juga menyebutkan bahwa prevalensi penduduk kurang gizi di Pakistan cukup tinggi sejak tahun 200-2020 yang berkisar diantara 21,1%-12,3% dengan kerawanan pangan tertinggi terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar 32,6%. Hal ini diakibatkan adanya faktor perubahan iklim global serta pandemi Covid-19.

**Tabel 13. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Pakistan**

Karakteristik/tahun	2000-2002	2004-2006	2009-2011	2014-2016	2017-2019	2019-2020
Prevalensi Penduduk Kurang Gizi (%)	21.1	17.6	15.4	12.8	12.3	14.1

Tingkat Ketidakpastian/Kerawanan Pangan (%)	0.9	1.6	4.8	8.7	14.2	32.6
Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8	Seed Bank	Pupuk	Keamanan Pangan	Halal Pangan	Agroindustri	CSA
	C	C	AK	C	K	K

Sumber: *Statistical Yearbook FAO 2022*

Ket : SB = Sangat Baik; B= Baik; C= Cukup; K= kurang

## Bangladesh

Bangladesh memiliki luas lahan pertanian sekitar 9 juta hektar dengan luas lahan suburnya sekitar 8,8 juta hektar dengan tanaman pangan utama mereka berupa padi dan jagung.

**Tabel 14. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Bangladesh**

Karakteristik/tahun	2000-2002	2004-2006	2009-2011	2014-2016	2017-2019	2019-2020
Prevalensi Penduduk Kurang Gizi (%)	15.9	14.2	15.2	14.0	11.5	11.4
Tingkat Ketidakpastian/Kerawanan Pangan (%)	13.3	10.6	10.5	10.7	31.5	31.7
Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8	Seed Bank	Pupuk	Keamanan Pangan	Halal Pangan	Agroindustri	CSA
	C	B	AK	C	C	K

Sumber: *Statistical Yearbook FAO 2022*

Ket : SB = Sangat Baik; B= Baik; C= Cukup; AK= Agak Kurang; K= kurang

Pertanian di Bangladesh sejak dulu memiliki beberapa tantangan diantaranya pengurangan lahan pertanian, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan wilayah garaman serta bencana akibat perubahan iklim. Melihat dari tabel dibawah, bahwa pada tahun 2009 hingga tahun 2020 prevalensi kurang gizi Bangladesh mengalami penurunan, akan tetapi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam kerawanan pangannya. Berdasarkan pengamatan penulis hal ini di sebabkan oleh terdampaknya sektor pertanian Bangladesh oleh perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, serta fenomena perubahan iklim lainnya.

## Iran

Pada masa awal pembentukan sektor pertanian dalam D-8, Iran menunjukkan tren penurunan prevalensi kurang gizi dan kerawanan pangan. Namun, pada periode 2017–2020, terjadi lonjakan signifikan dalam kerawanan pangan, meningkat dari 7,7% menjadi 40,6%.

**Tabel 15. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Iran.**

Karakteristik/tahun	2000-2002	2004-2006	2009-2011	2014-2016	2017-2019	2019-2020
Prevalensi Penduduk	4.8	5.2	6.1	4.7	5.2	4.9

Kurang Gizi (%)						
Tingkat Ketidakpastian/Kerawanan Pangan (%)	9.5	8.4	8.7	7.7	40.6	42.4
Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8	Seed Bank	Pupuk	Keamanan Pangan	Halal Pangan	Agroindustri	CSA
	C	SB	K	B	K	SB

Sumber: *Statistical Yearbook FAO 2022*

Ket : SB = Sangat Baik; B= Baik; C= Cukup; AK= Agak Kurang; K= kurang

Kenaikan drastis ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak negatif perubahan iklim terhadap produksi pertanian, meningkatnya inflasi, harga pangan yang tinggi, pemborosan pangan yang lebih besar, serta peningkatan kebutuhan impor pangan. Selain itu, sanksi internasional yang berkelanjutan membatasi akses Iran terhadap bahan pangan yang terjangkau, memperparah tantangan ketahanan pangan, pandemi COVID-19 juga turut memperburuk situasi. Dengan adanya hal tersebut Iran mulai mengencakan program-program CSA seperti *Smart Crop Management*, *Smart Integrated Food*, *Smart Livestock Management*, serta faktor lainnya.

## Nigeria

Nigeria sebagai negara Afrika memiliki banyak permasalahan utama seperti konflik berkepanjangan di negara bagian timur laut Nigeria, seperti Borno, Adamawa, dan Yobe, menyebabkan akses pangan terpengaruh, perubahan iklim juga menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pada hasil pertanian. Terlihat di tabel bawah bahwa Nigeria merupakan negara D-8 yang memiliki kerawanan pangan serta penduduk kurang gizi yang sangat tinggi diantara negara lainnya.

**Tabel 16. Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8 di Iran**

Karakteristik/tahun	2000-2002	2004-2006	2009-2011	2014-2016	2017-2019	2019-2020
Prevalensi Penduduk Kurang Gizi (%)	8.9	7.1	8.2	9.2	10.4	12.0
Tingkat Ketidakpastian/Kerawanan Pangan (%)	11.0	15.1	17.3	19.1	47.1	58.2
Implementasi Program Ketahanan Pangan D-8	Seed Bank	Pupuk	Keamanan Pangan	Halal Pangan	Agroindustri	CSA
	C	C	K	B	C	K

Sumber: *Statistical Yearbook FAO 2022*

Ket : SB = Sangat Baik; B= Baik; C= Cukup; AK= Agak Kurang; K= kurang

## KESIMPULAN

Sebagai organisasi Internasional, D-8 (Developing-8) didirikan berdasarkan kesamaan permasalahan yang sama. D-8 adalah organisasi untuk kerja sama ekonomi di antara negara-negara berikut: Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Pendirian D-8 diumumkan secara resmi melalui Deklarasi Istanbul pada KTT Kepala Negara/Pemerintahan pada tanggal 15 Juni 1997 (D-8, 2023). Pada awal pendirian D-8,

negara-negara yang terhimpun awalnya ditujukan untuk mengumpulkan kekuatan negara-negara Islam anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam), yang berupaya untuk menghadapi sikap mendua negara-negara barat dan ketidakadilan pada kerjasama ekonomi global. Akan tetapi pada perkembangannya, organisasi D-8 beralih menjadi organisasi yang tidak hanya eksklusif berlandaskan agama saja, serta ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Sejak tahun 2009 bidang pertanian menjadi salah satu fokus dalam agenda D-8. Pada awalnya fokus D-8 di bidang pertanian terkait dengan Bank Benih dengan dasar bahwa telah terjadi kepunahan terhadap sumberdaya genetik tanaman di wilayah anggota D-8. Fokus dibidang pertanian jauh lebih serius pada tahun 2011 yang mengusung tema ketahanan pangan dengan menyadari bahwa negara anggotanya merupakan negara-negara agraris, yang PDRB nya ditopang oleh pertanian. Ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembahasan bidang pertanian yang bertumpu pada hasil produksi pangannya. Disisi lain, tantangan sektor pertanian dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas mengalami banyak kendala serta ancaman teknis dan non teknis serta ancaman biotik dan abiotik. Menyadari betapa besarnya resiko dan ancaman terhadap sektor pertanian yang notabene merupakan sektor pemasok pangan utama, maka secara serius D-8 telah menawarkan pertanian cerdas iklim untuk menjadikan sistem pertanian lebih maju dan ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barnett, M. N., & Finnemore, M. (1999). The Politics, Power, and Pathologies of International Organization. *International Organization*, 699-732.
- Béland, D. (2005). Ideas and Social Policy: An Institutional Perspective. *Social Policy & Administration*, 1-18.
- Brinkerhoff, D. W. (1996). Process Perspectives On Policy Change: Highlighting Implementation. *World Development*, Vol 24, 1395-1401.
- Doğan, H. G. (2019). Contribution Of Livestock To Co2 Emission In D-8 (Developing-8) Countries: An Empirical Analyse Of Panel Data. *Applied Ecology And Environmental Research*. Fao. (2008). An Introduction To The Basic Concepts Of Food Security. Diambil Kembali Dari Food And Agriculture Organization: <https://www.fao.org/3/A1936e/A1936e00.pdf>
- Fao. (2018). World Livestock: Transforming The Livestock Sector Through The Sustainable Development Goals. Rome: Food And Agriculture Organization Of The United Nations.
- Fao. (2023, Agustus 23). Suite Of Food Security Indicators. Diambil Kembali Dari Faostat: <https://www.fao.org/faostat/en/#Data/Fs>
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2002). The Policy Effects Of Internationalization: A Subsystem Adjustment Analysis of Policy Change. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 4, 31-50.
- Ian Budge, L. E. (2010). Ideology, Party Factionalism and Policy Change: An integrated dynamic theory. *British Journal of Political Science*, 781-804.
- (1997). Istanbul Declaration. Istanbul: Developing-8.
- Katzenstein, P. J., Keohane, R. O., & Krasner, S. D. (1998). International Organization and the Study of World Politics. *International Organization*, 645-685.
- Kratochwil, F., & Ruggie, J. G. (1986). International organization: a state of the art on an art Of The State. *International Organization*, 754-775.

- Kuala Lumpur Initiative To Address Food Security In D-8 Countries. (2009). Developing Eight (D-8) Ministers' Meeting On Food Security (hal. 1-7). Kuala Lumpur: Developing-8.
- Mahardhani, A. J. (2022). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Dalam M. R. Pahleviannur, D. N. Saputra, N. D. Sinthania, V. O. Bano, E. E. Susanto, Amruddin, & M. Lisya, Metodologi Penelitian Kualitatif (Hal. 123-136). Pradina Pustaka.
- Martin-Shields, C. P., & Stojetz, W. (2018). Food Security And Conflict: Empirical Challenges And Future Opportunities For Research And Policy Making On Food Security And Conflict. World Development.
- Nisak, Z. (2013). Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. Jurnal Ekbis. 9(2), 468-476.
- (2022). Seventh D-8 Agricultural Ministerial Meeting On Agriculture And Food Security. Dhaka: Developing-8. (2020). Sixth D-8 Ministerial Meeting On Agriculture And Food Security. Developing-8. Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, NO. 2, 57-65. (2011). Tehran Initiative. Tehran: Developing-8.
- Vetterlein, A. (2007). Change in international organizations: innovation or adaptation? A comparison of the World Bank and the International Monetary Fund. Dalam C. W. Diane Stone, The World Bank and Governance A Decade of Reform and Reaction (hal. 125-144). New York: Routledge.
- FAO Food Agriculture Organization. 2015. Climate Change And Food Security: Risks And Responses. [Internet] (Cited 2023 Jan 8] Tersedia dari: <https://www.fao.org/3/I5188e/I5188E.Pdf> [FAO] Food Agriculture Organization. 2017. The future of food and agriculture. Trend and challenges. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome [Internet]. [cited 2021 May 23]. Tersedia dari: [www.fao.org/3/a-i6583e.pdf](http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf)